



Mempelajari sejarah lokal tentu tidak cukup hanya dengan pemahaman secara konseptual dan metodologis, tetapi memerlukan telaah khusus atas sejumlah peristiwa. Buku ini menyajikan banyak peristiwa menarik di Sulawesi Selatan yang telah digali dalam tumpukan lapis waktu bersama kemauan ilmiah untuk menjamahnya dan menghadirkannya dalam rupa buku bacaan

Bagian awal buku ini memuat konsep Tomanurung yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, maupun dalam kedudukan politis. Bagian berikut mengurai tentang suatu asumsi bahwa pada hakekatnya penarikan nilai dari suatu episode sejarah tidak lain adalah proses subyektifikasi, yaitu pemberian interpretasi terhadap suatu episode sejarah kaitannya dengan kebutuhan masa kini yang dihubungkan dengan terror Westerling di Sulawesi Selatan.

Peristiwa lokal lainnya yang tidak kalah menarik, yakni kondisi Sulawesi Selatan sejak abad XVI yang diwarnai oleh konflik/peperangan antara kerajaan untuk memperebutkan hegemoni. Bahkan dunia politik yang dipaparkan dalam buku ini tidak hanya sebatas itu, tetapi hubungan Sulawesi Selatan dengan dunia luar pun dibahas. Selanjutnya diulas masa kekuasaan kolonial, kiprah para tokoh pengukir sejarah, dan warisan budaya masa lampau.

Buku ini sangat relevan untuk mata kuliah Sejarah Lokal, sehingga perlu untuk dibaca baik kalangan dosen sejarah, mahasiswa, serta segenap peminat dan pecinta sejarah.

ISBN 978-602-95545-6-4



9 786029 554564

Sampul Depan: Lukisan Makassar dan Benteng Sombaopu tahun 1660
sumber Foto: Nederlandsche Schiedkundige Atlas



Rayhan Intermedia

Najamuddin, dkk

SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE

PENDIDIKAN SEJARAH

NO. REG : B2

JML : 1

TA : 2017



SULAWESI SELATAN

TEMPO DOELOE

Mozaik Sejarah Lokal



Najamuddin, dkk

SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE

(Mozaik Sejarah Lokal)

Najamuddin | Patahuddin | Bahri |
Ahmadin | M. Rasyid Ridha | Burhanuddin Pabitjara |
St. Junaeda | M. Saleh Madjid | Amiruddin |
Mustari Bosra | Abd. Rahman |
Darman Manda | Mubarak Dahlan | Jumadi |
Andi Ima Kesuma

RAYHAN INTERMEDIA
2016

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sulawesi Selatan Tempo Doeloe: Mozaik Sejarah Lokal

Copyright © Najamuddin, dkk

Penerbit:

RAYHAN INTERMEDIA

Jl. Naja Dg. Nai Lr. 4 No. 8
Rappokalling Makassar 90216
Tlp. (0411) 433602, SMS: 082187619656
Email: rayhanbook@gmail.com
Toko Buku Online Rayhan Intermedia Group:
www.tokobukurayhan.com

Desain Cover: Saung Visual

Cetakan Pertama, Agustus 2009

Cetakan Kedua, Agustus 2015

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Najamuddin, dkk, Sulawesi Selatan Tempo Doeloe,
Cet. III: Oktober 2016, Rayhan Intermedia,
326 hlm (xiv + 312 hlm): 14 x 21 cm
ISBN: 978-602-95545-6-4

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

BAGIAN PERTAMA KEKUASAAN, DINAMIKA POLITIK, DAN PERJUANGAN — 1

Kontrak Sosial: Pola Hubungan Bangsawan
dan Rakyat di Sulawesi Selatan — 2

▪ **Najamuddin**

Perjuangan dan Pengorbanan Rakyat Sulawesi
Selatan: Reinterpretasi Nilai Sejarah dari
Peristiwa Korban 40.000 Jiwa — 17

▪ **Patahuddin**

Perebutan Tahta di Sulawesi Selatan — 32

▪ **Bahri**

Kuasa Penjajah di Nusa Selayar — 61

▪ **Ahmadin**

Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang
di Pare-Pare 1942-1945 — 81

▪ **M. Rasyid Ridha**

Suppa Pada Masa Revolusi Fisik — 100

▪ **Burhanuddin Pabitjara**

Menggagas Ide Kebangsaan: Dinamika Organisasi Nasional di Sulawesi Selatan dalam Mengawal Pergerakan Nasional — 142

▪ **St. Junaeda**

BAGIAN KEDUA

HUBUNGAN DIPLOMATIK & SISTEM

PEMERINTAHAN — 165

Meretas Hubungan Bima-Makassar Abad XVII — 167

▪ **M. Saleh Madjid**

Hubungan Diplomatik Bone-Buton Abad XVII — 190

▪ **Amiruddin**

Sejarah Singkat Bate Salapanga Ri Gowa — 218

▪ **Mustari Bosra**

Patuntung: Sistem Pemerintahan di Butta Toa Kajang — 228

▪ **Abd. Rahman A. Sakka**

BAGIAN KETIGA

WARISAN BUDAYA & PROFIL TOKOH — 244

Upacara Perkawinan Komunitas Toani

Tolotang di Amparita — 245

▪ **Darman Manda**

Phinisi: Identitas Bugis-Makassar — 256

▪ **Mubarak Dahlan**

Akar Kepahlawanan Andi Sultan Daeng Raja Karaeng Gantarang — 279

▪ **Jumadi**

Lataddampare Puang Rimaggalatung: Sosok Pemikir dan Pemimpin Lokal Wajo — 290

▪ **Andi Ima Kesuma**

BIOGRAFI PENULIS — 306

PENGANTAR PENERBIT

Upaya menemukani identitas lokal masing-masing etnik dan spasial di Indonesia, tampaknya semakin gencar dilakukan terutama pasca bergulirnya otonomi daerah. Bahkan tidak jarang keserupaan (hubungan) sejarah dan kemiripan warisan budaya menjadi determinan kuat atas terbentuknya wilayah administrasi baru (pemekaran wilayah). Tak terkecuali beberapa daerah di Sulawesi Selatan, sejauh ini masyarakatnya pun tampak gencar melakukan gerakan kebudayaan berdimensi historis. Bersama kerinduan akan masa lalu atas nama identitas inilah, kehadiran buku ini menjadi penting.

Di sisi lain harus diakui bahwa mempelajari sejarah lokal tentu tidak cukup hanya dengan pemahaman secara konseptual dan metodologis, tetapi memerlukan telaah khusus atas sejumlah peristiwa. Untuk maksud tersebut, diperlukan pengayaan bangunan ilmiah tersebut dengan cara menyajikan beberapa peristiwa lokal di Sulawesi

Selatan. Banyak peristiwa menarik dalam tumpukan lapis waktu yang memerlukan sentuhan kemauan untuk menjamahnya serta menghadirkannya dalam rupa buku bacaan dan bahan ajar.

Lalu seperti apa hubungan penguasa dan rakyat (kontrak sosial)?, mengapa terjadi perebutan tahta?, bagaimana kaum kolonial menjajah?, kapan terjadi hubungan kekuasaan dengan dunia luar?, siapa saja tokoh pengukir sejarah?, dan apa saja warisan budaya masa lampau di Sulawesi Selatan?, itulah sederet pertanyaan yang dijawab oleh sejumlah penulis yang tersaji dalam setiap bagian buku ini.

Bagian awal buku ini memuat konsep *Tomanurung* yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, maupun dalam kedudukan politis di Sulawesi Selatan. Kontrak sosial dan kontrak pemerintahan inilah yang kemudian mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing kedua belah pihak antara elit bangsawan dan rakyat kebanyakan sebagai manusia Bugis-Makassar. Kedua kontrak atau ikatan perjanjian tersebut mencerminkan adanya pola hubungan yang seimbang antara elit bangsawan atau penguasa dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan.

Bagian berikut buku ini mengurai tentang suatu asumsi bahwa pada hakekatnya penarikan nilai dari suatu episode sejarah tidak lain dari proses subyektifikasi, yaitu pemberian interpretasi terhadap suatu episode sejarah dalam kaitannya dengan kebutuhan masa kini. Demikian pula halnya dalam penarikan nilai sejarah dari episode sejarah terror Westerling di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini adalah salah satu bahagian dari episode sejarah perjuangan bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan yang dikenal dengan istilah Perang Kemerdekaan. Periode Perang Kemerdekaan dalam Sejarah Indonesia memiliki ciri-ciri khas, yaitu sarat dengan emosi, semangat, keberanian, kerelaan berkorban, cinta tanah air, bangsa dan Negara sendiri. Semangat dan jiwa kepahlawanan tersebut tetap diperlukan sepanjang zaman dan seluas ruang yang ada dalam dunia ini.

Peristiwa lokal lainnya yang tidak kalah menarik, yakni kondisi Sulawesi Selatan sejak abad XVI yang ditandai oleh konflik berupa peperangan antara kerajaan untuk memperebutkan hegemoni (kekuasaan tunggal). Karena itu, Tellu Poccoe (Bone, Wajo, Soppeng) lahir sebagai suatu persekutuan berupa ikatan persaudaraan yang bertujuan politik, yakni melawan serta mengimbangi kekuatan

Kerajaan Gowa. Persekutuan ini dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang diadakan di Timurung Kampung Bunne Desa Allamungpatue, Kecamatan Ajang Ale, (Kabupaten Bone sekarang) pada 1582.

Khusus kurun kolonial di Sulawesi Selatan, dibahas dalam dua judul masing-masing mengurai tentang Selayar masa pendudukan Belanda-Jepang dan nasib perempuan di antara kebijakan militer Jepang di Pare-pare. Bahkan dilanjutkan dengan uraian tentang Suppa masa revolusi fisik. Menurut penulisnya, perjuangan rakyat Suppa dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang Imperialisme Belanda. Selain itu, suatu fakta historis menunjukkan bahwa perjuangan itu, merupakan konsekuensi logis daripada proklamasi 17 Agustus 1945.

Dunia politik yang dipaparkan dalam buku ini, tidak hanya sebatas hubungan antar penguasa dan rakyat serta perebutan tahta, akan tetapi hubungan Sulawesi Selatan dengan dunia luar pun dibahas. Sebut saja hubungan Makassar dengan Bima, serta hubungan diplomatik Bone dengan Buton menjadi warna tersendiri bagi kajian sejarah lokal di daerah ini.

Satu kajian menarik lagi yakni ulasan tentang spasial yang terletak antara Sungai Je'neberang dan Sungai Tallo (sekarang, bagian dari wilayah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar). Terdapat 9 (sembilan) buah kampung yang didiami oleh penduduk yang dikenal sebagai *Tu Gowa atau Tu Mangkasara*, yaitu Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang (Parangtambung?), Data, Agang Je'ne (Pacci'nongang?), Bisei, Sero', dan Kalling (Kassi?). Kampung-kampung tersebut merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan diperintah/dipimpin oleh seorang raja yang disebut juga sebagai *Kasuwiyang/Gallarrang* Dengan panggilan/gelar kehormatan sebagai *Daengta/Kare (Karaeng)*. Dalam perkembangan selanjutnya, kesembilan kerajaan kecil tersebut bersepakat menggabungkan diri sehingga menjadi "semacam kerajaan federasi."

Melengkapi uraian tentang kekuasaan dan dunia politik di Sulawesi Selatan, buku ini juga mengurai tentang warisan budaya masing-masing kepercayaan Patuntung di komunitas Amma Toa Kajang, tradisi perkawinan di Komunitas Tolotang Amparita, dan phinisi sebagai simbol identitas Bugis-Makassar. Kemudian dua tulisan terakhir masing-masing mengurai tentang Akar Kepahlawanan Andi

Sultan Daeng Raja serta Lataddampare Puang Rimaggalatung sebagai sosok pemikir dan pemimpin Lokal Wajo.

Buku ini ibarat sebuah jendela masa yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk melihat dimensi kelampauan Sulawesi Selatan. Semoga buku karya dosen-dosen jurusan sejarah UNM ini dapat membantu kita dalam upaya menemukan identitas lokal dan jati diri serta menjadi materi kuliah sejarah lokal.

Makassar, 10 Februari 2015

REDAKSI RAYHAN INTERMEDIA

"Bagian awal buku ini memuat konsep Tomanurung yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, maupun dalam kedudukan politis di Sulawesi Selatan. Kontrak sosial dan kontrak pemerintahan inilah yang kemudian mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing kedua belah pihak antara elit bangsawan dan rakyat kebanyakan sebagai manusia Bugis-Makassar".

KONTRAK SOSIAL: POLA HUBUNGAN BANGSAWAN & RAKYAT DI SULAWESI SELATAN

· Najamuddin

Konsepsi *Tomanurung* (Bugis) atau *Tumanurung* (Ma-kassar) mempengaruhi sebagian besar kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, merupakan simbol kerajaan dan cikal bakal munculnya raja-raja yang memerintah. Konsep ini mengharuskan bahwa siapapun yang dicalonkan menjadi raja dia harus berasal dari darah murni darah titisan dewa. Dari persepsi demikian, maka hanyalah golongan bangsawan yang memiliki garis *Tomanurung* yang dianggap dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, seperti raja dan berbagai jabatan lainnya sampai ke tingkat desa.

Stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi istimewa terhadap kaum

PEREBUTAN TAHTA DI SULAWESI SELATAN (PERANG ANTARKERAJAAN GOWA & TELLU POCCOE)

Bahri

Pendahuluan

Sejak abad XVI di Sulawesi Selatan terjadi konflik berupa peperangan antara kerajaan untuk memperebutkan hegemoni (kekuasaan tunggal). Dalam abad XVI-XVII, Kerajaan Gowa muncul sebagai kerajaan terkuat yang berhasil merebut hegemoni tersebut. Kekuatan Kerajaan Gowa karena didukung oleh keberhasilannya dalam perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Gowa memiliki letak yang strategis yang terletak di pesisir pantai dan diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Jeneberang di Selatan dan Sungai Tallo di Sebelah Utara. Kerajaan Gowa menjadi bandar transito antara Malaka dengan Maluku. "Makassar (Gowa) menjadi pusat pemasaran hasil dari wilayah Indonesia Timur serta

tempat mengambil bahan makanan" (Kartodirdjo, 1992: 88).

Keberuntungan Kerajaan Gowa dalam bidang perdagangan dan pelayaran dimanfaatkannya untuk memperkokoh kedudukannya sebagai kerajaan yang bertahta tunggal, bukan hanya di Jazirah Sulawesi Selatan tapi juga di Kawasan Timur Nusantara. Pertumbuhan Kerajaan Gowa untuk mencapai kedudukan yang penting itu dapat ditelusuri sejak Raja Gowa IX bernama Tumaparrisi Kallonna (\pm 1510/1511-1546/1547) yang berhasil mempersatukan Tallo ke dalam Kerajaan Gowa (Kerajaan kembar Gowa-Tallo).

I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung yang gelar matinya "Karaeng Tunipalangga Ulaweng", Raja Gowa X (1546-1565). Tunipalangga Ulaweng meneruskan usaha-usaha perluasan wilayah yang telah dimulai ayahnya. Perluasan wilayah Kerajaan Gowa pada masa pemerintahan I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung lebih luas daripada yang pernah dicapai Tumaparrisi Kallonna. Daerah-daerah yang ditaklukkan Kerajaan Gowa Tumaparrisi Kallonna, di antaranya "Bajeng, Langkase, Polongbangkeng, Lamuru, Soppeng, Cenrana, Salomekko, Kajang, Lamatti, Wajo, Otting, Bulu Cenrana, Suppa, Sawitto, Alitta, Duri,

Panaikang" (Wolholff dan Abdurrahim, 1962: 23-24). Tunipalangga Ulaweng menyerang pula Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone VII La Tenrirawe Bongkange (1560-1584), tetapi gagal karena menderita sakit dan meninggal pada tahun 1563 (Rachman, 1991: 28). Sebagai Raja Gowa XI adalah I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata, yang kemudian melanjutkan peperangan dengan Kerajaan Bone. Namun, beliau pun tewas dalam peperangan.

Politik Kerajaan Gowayang semakin agresif dan ekspansif mulai mengancam Kerajaan Bone yang terletak di tengah-tengah daerah pengaruh Kerajaan Gowa. Posisi Kerajaan Bone yang demikian sangat mengkhawatirkan Raja Bone La Tenrirawe Bongkange dan penasehatnya La Mellong yang lebih dikenal dengan nama Kajao Laliddong. Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo yang berstatus sebagai kerajaan jajahan Kerajaan Gowa, berhasil dipengaruhi oleh Kerajaan Bone untuk menyatukan visi melawan ekspansi Kerajaan Gowa dengan menyepakati perjanjian bersama yang disebut *Lamumpatue ri Timurung* dengan nama aliansi *Tellu Poccoe* atau Tiga Puncak Kerajaan Terbesar.

Ulu Kanaya ri Caleppa: Takluknya Kerajaan Gowa dari Kerajaan Bone

Terbentuknya *Tellu Limpoe* pada abad ke XIV yang melibatkan tiga kerajaan yakni Kerajaan Bulobulo, Lamatti dan Tondong adalah sebuah upaya dari Kerajaan Bone yang pada saat itu diperintah oleh Raja Bone ke VII La Tenrirawe Bongkange (1560-1584) untuk mematahkan ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa karena daerah tiga kerajaan ini merupakan berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Bone. "Walaupun Raja Bone sangat ragu mengingat *Tellu Limpoe* adalah daerah taklukan Gowa akan tetapi nampaknya *Matowa Tellu Limpoe* bertegas dengan segala resikonya. Penegasan *Matowa Tellu Limpoe* itu, maka raja Bone menerima dengan segala resikonya pula. Melihat kenyataan ini Raja Gowa sangat marah dan menyesali hal itu" (Sessu, 1990: 53). Hal ini merupakan salah satu penyebab peperangan antara Bone dengan Gowa yang dimulai kira-kira pada tahun 1558 sebab dalam sejarah Gowa disebutkan "*78 annang taungi antudju bulanna siewa tu-bonea namate* (maksudnya: setelah enam tahun tujuh bulan ia berperang dengan orang Bone; maka iapun meninggal dunia (*Tunipalangga Ulaweng*)" (Wolholff dan Abdurrahim, 1962: 29).

Di bawah pimpinan Tunipalangga Ulaweng, pasukan Gowa menyerang di sebelah selatan Meru. Peperangan berlangsung selama tiga hari, kemudian diadakan perjanjian antara Bone dengan Gowa yang menjadikan Sungai Tangka sebagai perbatasan wilayah pengaruh antara Bone dengan Gowa. "Semua daerah di sebelah utara Sungai Tangka termasuk wilayah Kerajaan Bone, sedangkan pada bagian selatan Sungai Tangka termasuk wilayah Kerajaan Gowa. Perjanjian persahabatan ini dinamakan *Cori Dewata* yang berarti Garis Dewata" (Sessu, 1990: 55).

Hanya berselang beberapa saat, datang lagi Tunipalangga Ulaweng bersama pasukannya, mereka mengambil posisi di Cellu. Pasukan Gowa kali ini lebih besar jumlahnya. Pertempuran kemudian terjadi antara pasukan Bone dengan pasukan Gowa, mereka bertempur dibawah pimpinan raja masing-masing yang dikenal sebagai pemberani. Pada hari kelima pertempuran raja Gowa mendapat luka-luka, sehingga terpaksa pasukan Gowa mundur dan kembali ke Gowa.

Dua tahun kemudian, setelah sembuh dari lukanya Tunipalangga Ulaweng mempersiapkan kembali pasukannya lebih matang dengan jumlah yang lebih besar dari penyerangan sebelumnya.

Pasukan Gowa membangun benteng pertahanan di Walennae. Setelah pertempuran berlangsung tujuh hari, Tunipalangga Ulaweng jatuh sakit. Pertempuran tidak dapat diteruskan sehingga pasukannya kembali lagi ke Gowa. Tunipalangga Ulaweng wafat dalam tahun 1565 setelah 48 hari sejak kepulangannya dari Bone.

Tunipalangga Ulaweng digantikan oleh saudaranya I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data menjadi raja Gowa XI (1565). Hanya dua bulan setelah pelantikannya Daeng Marompa melakukan penyerangan ke Bone. Serangan pasukan Gowa yang keempat ini memperlihatkan kemajuan karena Ajang Ale dan Awangpone, dua daerah bawahan Bone telah didudukinya. Bahkan telah mengancam kota kerajaan. Bahkan "Dapat menguasai pinggiran pusat kota kerajaan di daerah Bukaka dan Takkeaju" (Rasyid, 1994/1995: 78).

Ketika pasukan Gowa terlena dengan kemenangan, pasukan Bone menyerang. Serangan mendadak itu membuat pasukan Gowa terjepit dan berakibat fatal dengan terbunuhnya Daeng Marompa dengan kepala terpancung oleh seorang prajurit Bone bernama La Tunru. Itulah sebabnya Daeng Marompa diberikan gelar mati "Tunibatta" (yang terpancung). Akibat kematian Daeng

Marompa, memaksa Gowa untuk berunding dengan Bone pada tahun 1565. Dari perundingan itulah lahir pembaharuan Perjanjian Caleppa (Bugis: *CeppaE ri Caleppa*, Makassar: *Uju Kanaya ri Caleppa*).

Perjanjian Caleppa sangat merugikan pihak Gowa karena tuntutan menyerahkan seluruh daerah-daerah yang membentang sampai ke Ulaweng, daerah-daerah di sebelah Utara Sungai Tangka dan Cenrana. Meskipun amat berat bagi Gowa, tetapi sebagai pihak yang kalah terpaksa menerima-nya. Demikianlah peperangan antara Bone dengan Gowa yang berlangsung lebih enam tahun.

Lamumpatue ri Timurung

Tellu Poccoe (Bone, Wajo, Soppeng) adalah suatu persekutuan berupa ikatan persaudaraan yang bertujuan politik, yakni melawan serta mengimbangi kekuatan Kerajaan Gowa. Persekutuan Tellu Poccoe dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang diadakan di Timurung Kampung Bunne Desa Allamungpatue, Kecamatan Ajang Ale, (Kabupaten Bone sekarang) pada tahun 1582. perjanjian ini dihadiri oleh tiga raja dari tiga kerajaan anggota Tellu Poccoe. Kerajaan Bone diwakili oleh La Tenrirawe Bongkange, Kerajaan Wajo Mungkace to Uddameng Arung Matowa XI Raja XIV (\pm 1567-

1607), dan Kerajaan Soppeng diwakili oleh La Mappedeppe PatolaE Arung Belo Datu Soppeng XIII (1580-1601). Akhirnya dalam tahun 1582 itu juga pada waktu yang telah ditentukan "tepat pada saat bulan purnama (*tepunna UlengngE*) duduklah ketiga raja Bugis itu dalam perundingan" (Patunru, 1989: 54). Ketiganya didampingi oleh cendikiawan masing-masing, La Mellong dari Bone, To Maddualeng dari Wajo, dan To Tongeng dari Soppeng.

Mendahului ucapan perjanjian, terjadilah pembicaraan antara ketiga raja mengenai masalah yang dihadapi dan cara mempersaudarakan kerajaan mereka. Atas kebijaksanaan Raja Bone dan Wajo, Soppeng diberikan daerah Goa-Goa (Bone) dan daerah Baringeng (Wajo). Kemudian masing-masing raja mengambil telur berikrar, ikrar itu berbunyi:

1. *Tanatta mattulu parajo, teppettu sirangrenggi, sanre tessibelleanggi, tessiluppe macekowang-ngi.* (negeri kita bagai *tulu parajo* (tali ikatan pada leher kerbau), takkan putus, berkembang saling menguatkan, tak akan saling mengecewakan, takkan saling tipu menipu diantara kita).

2. *Tessireddu taneng-tanengi tessi attaneng-tanengngi, tessiseringeng roppo-roppo, tessi akkaleng-kalengngi, tessi tangeng tollariwi, tessi tangeng to pasala.* (Tidak saling merusak usaha, tidak saling melanggar hak, tidak saling melemparkan kejelekan diantara satu sama lain, tidak saling menyembunyikan (berterus terang), tak akan saling melindungi pelarian dan tak akan menahan orang-orang bersalah (bila orang-orang bersalah itu berada atau berbunyi dalam salah satu negeri diantara kita)
3. *Sirekkokeng to matojoi, silasekkeng tedong laiwi.* (Saling membantu menunjukkan anak buah yang berkepala batu dan saling membantu).
4. *Tessi tonrong atai, tessi rebba adekki, tessi lawa bicarai, tessi peddeng arrajang.* (Saling membantu menunjukkan anak buah yang berkepala batu dan saling membantu menundukkan pemberontak (yang mau menentang) bila terdapat diantara negeri kita).
5. *Pada makkadawang risaliwengi temmakkada-wang rilaleng.* (Takkan

menghukum rakyat salah satu dari negeri kita (bila ada orang bersalah hendaknya diserahkan kembali kepada negeri asalnya), takkan saling melanggar adapt kebesaran diantara kita, takkan saling menolak bicara (yang telah diputuskan) antara kita, takkan saling menghina memusnahkan satu sama lain)

6. *Tessi bicara musukki, tennapisalalai to bongngo, tennapangkagaki to kanna, tenna bicara to risaliweng.* (Takkan ada persoalan perang diantara kita bertiga; kita takkan sampai dipertikaikan orang yang picik pengetahuannya, takkan diadili oleh orang luar (segala persoalan yang timbul dalam negeri kita akan diselesaikan sendiri secara ke dalam).
7. *Tessipolo tajengngi, tessibola waramparang-ngi, riwerengngi anu malaletta.* (Takkan saling menghalangi antara kita terhadap penundaan sesuatu yang diperlukan, takkan saling menyimpan (menyembunyikan) harta benda antara kita (apa yang menjadi harta, milik seseorang diantara kita yang sudah terang menuju/menjadi hak seseorang).

8. *Tessipakeane tawangngi, tessiwawai ri teyata, tessi elli atai, tessiyateppekengngi rekko engka akkeda atangetta nataniya suro ribeteng mpawai, tomateppee-tu mamta nallai tedong mauni ana arung muna.* (Takkan ada pembahagian turunan hamba sahaya diantara kita (anak-anak hamba sahaya tetap jatuh ke pihak ibunya) takkan ada paksaan antara kita bila salah satu dari kita keberatan, tak ada jual beli hamba sahaya antara kita bertiga, tidak akan segera mempercayai sesuatu berita antara kita jika bukan utusan resmi yang datang menyampaikan dan orang yang percaya itu akan mati sia-sia, walaupun dia adalah seorang bangsawan).
9. *Siatuwo bake manukki, nnange'ssampeakki malemme siewangngi.* (Kita saling menyela-matkan hidup walaupun negeri kita sudah runtuh (tolong menolong) kita saling mengulurkan tangan jika kita dalam kesusahan, kita bersedia saling berkorban, bila ada diantara kita terancam bahaya maut).
10. *Padai madeceng padai maja, pada mate pada tuwo.* (Antara kita senasib

sepenanggungan, takkan ada diantara kita yang membiarkan kematian seorang tanpa pembelaan dari kita).

11. *Tennanre api tennanre jaktana, tennatiwi tomate asseyajingenna, mauni maruttung langi-e, mawottong pertiwi temmalukato asseyajingenna tanata.* (Takkan hangus oleh api, takkan dirusak kejahatan bumi, takkan terbawa serta oleh kematian seseorang akan persaudaraan dan perjanjian luhur negeri kita; walaupun andaikan langit akan runtuh/rubuh, bertindih pertiwi, takkan putus juga persaudaraan negeri kita).
12. *Nigi-nigi mpelai ulu ada, mareppak pinceng maressa ittello, tana tudangenna, nasabbiwi dewata seuawe.* (Barang siapa ingkar dari janji, maka hancur bagaikan beling serta pecah bagaikan sebutir telur negeri kediamannya, ikrar ini dibawah kesaksian Dewata nan Tunggal) (Patunru, 1989: 54-57).

Selesai mengucapkan janji tersebut, ketiga raja lalu menjatuhkan telur di atas batu, ketiganya kemudian mena-nam batu masing-masing sebagai pertanda pengukuhan atas perjanjian itu. Tempat

perjanjian dan batu yang ditanam itu masih dapat dijumpai sekarang. Mereka lalu menamakan negerinya Tellu Poccoe atau Tiga Negeri Puncak Kerajaan (Patunru, 1989: 57).

Gagasan untuk membentuk suatu persekutuan adalah suatu antisipasi politik dari Bone untuk menghadapi Gowa dan membendung Luwu dalam usahanya merebut hegemoni Gowa di Sulawesi Selatan. Gagasan untuk membentuk suatu persekutuan ini didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. La Tenrirawe Bongkange didampingi oleh seorang penasehat yang cerdas yaitu La Mellong Kajao Laliddong;
2. Inspirasi membentuk suatu persekutuan merupakan ide yang timbul karena sebelumnya telah ada bentuk-bentuk persekutuan, seperti dalam tahun 1440 melalui Perjanjian *Tamajara* melahirkan persekutuan *Pitu Babanna Biananga* dan *Pitu Ulunna Salu*, kemudian pada tahun 1561 dalam Perjanjian *Topekkong* terbentuk *Tellu Limpoe*.
3. Adanya persamaan sebagai orang bugis, "Didorong oleh persamaan kepribadian

sebagai kerajaan pendukung utama kebudayaan dan adat bugis" (Ramalang, 1992: 54).

4. Adanya kesempatan yang tepat, karena setelah perjanjian *Caleppa* tahun 1565, tidak terjadi perang antara Gowa dengan Bone selama kurang lebih 10 tahun. Pada pihak lain, Wajo dan Soppeng dalam tekanan Gowa.

Maksud La Tenrirawe Bongkange dan Kajao Laliddong adalah memperkuat kedudukan Bone dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan, seperti ditulis oleh Ramalang (1992: 54) "Untuk memperkuat kedudukan Kerajaan Bone di tengah-tengah pergolakan politik, yang dimaksud adalah adanya Luwu di Utara dan Gowa di Selatan. Sulistiyo (1992: 6) mengatakan "Ancaman dan klaim kekuasaan Luwu dan Gowa telah memaksa kerajaan-kerajaan di antara dua kerajaan itu untuk membentuk persekutuan".

Manfaat persekutuan yang dimaksudkan adalah manfaat adanya persekutuan Tellu Poccoe bagi masing-masing anggotanya. Adapun manfaat persekutuan Tellu Poccoe bagi Bone, Wajo dan Soppeng adalah: (1) Situasi politik masa itu penuh dengan konflik, sehingga secara langsung menjamin

tidak timbulnya gangguan keamanan dari masing-masing pihak; (2) Bagi Bone sendiri minimal ada dua manfaatnya, yaitu: (a) Memperkokoh kedudukannya sebagai kerajaan Bugis yang utama, (b) Suatu usaha meningkatkan kewas-padaan” (Mattulada, 1991: 36). Maksudnya; Wajo dan Soppeng berbatasan langsung dengan Bone, membiarkan Wajo dan Soppeng di bawah pengaruh Gowa sama halnya menodongkan moncong senjata di depan mata; (3) Bagi Wajo dan Soppeng, mendapat dukungan yang memung-kinkan melepaskan diri dari pengaruh Gowa; (4) Bagi Soppeng, kerajaannya bertambah luas karena mendapat daerah Gowa-Goa dari Bone dan Baringeng dari Wajo (Yani, 1995: 73-74).

Tellu Poccoe versus Kerajaan Gowa

Pembentukan Tellu Poccoe memberikan alasan bagi Kerajaan Gowa untuk menyerang ketiga kerajaan Bugis, yaitu Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng. Bagi Kerajaan Gowa ketiga kerajaan tersebut mempunyai kesalahan, karena itu harus dihukum. Kerajaan Bone adalah sahabat Kerajaan Gowa berdasarkan Perjanjian Caleppa, Wajo dan Soppeng adalah daerah taklukan Kerajaan Gowa. Kerajaan Bone dianggap berkhianat sebagai sahabat dan Wajo-Soppeng dianggap membangkang. “Sikap Kerajaan Gowa tidak mung-kin lain dari pada

menghukum mereka”. Mattulada (1991: 36). Kerajaan Gowa melancarkan serangan untuk menghukum Tellu Poccoe, tetapi sampai tahun 1590 tidak pernah berhasil. “Malahan baginda mengalami pada waktu itu nasib yang menyedihkan” (Patunru, 1967: 17-18). Raja Gowa yang dimaksud adalah I Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bonto Langkasa, dia diamuk dalam perjalanan oleh seorang pengikutnya sehingga diberikan gelar mati “Tunijallo” (yang diamuk).

Terbentuknya Tellu Poccoe pada tahun 1582 menam-bah keruhnya kondisi politik di Jazirah Sulawesi Selatan. Hal tersebutlah yang mensugesti Gowa untuk melakukan serangan besar-besaran ke Bone karena “Lamungpatue ri Timurung adalah benar-benar politik tantangan dari Bone, Wadjo, dan Soppeng terhadap Gowa”. Patunru (1964: 55). Gowa menyerang kerajaan-kerajaan Tellu Poccoe dengan alasan: (1) Bagi Kerajaan Gowa pembentukan Tellu Poccoe berarti suatu ancaman langsung terhadap supremasinya yang tertanam sejak waktu yang lama; (2) Kerajaan Wajo dan Soppeng, dianggap sebagai Kerajaan-kerajaan bawahan yang melakukan pemberontakan terhadap kekuatan Gowa; (3) Terhadap Kerajaan Bone, Gowa menganggapnya telah melanggar kehormatan Gowa karena

sebelumnya telah diadakan Perjanjian Caleppa; (4) Soal kesempatan, lebih baik mendahului daripada didahului (Rasyid, 1994/1995: 26).

Serangan pertama Gowa dimulai pada tahun 1583. Pada serangan pertama ini raja dari masing-masing anggota *Tellu Poccoe* adalah La Tenrirawe Bongkange di Bone, La Mungkace To U'damang di Wajo, dan La Mappaleppe di Soppeng. Serangan Gowa ini ditujukan terhadap Wajo. Gowa dibantu oleh sekutunya Luwu, sedangkan Wajo dibantu oleh sekutunya Bone dan Soppeng. Kekuatan gabungan *Tellu Poccoe* ini ternyata cukup tangguh menahan gempuran pasukan Gowa sehingga pasukan Gowa tidak mampu menembus pertahanan *Tellu Poccoe*. Dalam tahun 1583 ini juga pasukan Gowa dapat dihalau dari Wajo.

Pada tahun 1584 kembali ke Gowa meyerang Wajo, tapi gagal. "Pada tahun ini Raja Gowa menyerang kembali Wajo, tetapi tidak berhasil". Dari berbagai sumber serangan tahun 1584 ini tidak diperhitungkan (Rahmah, 1991: 31). Pada tahun 1585, kembali Gowa melakukan serangan bertikutnya dan yang menjadi sasarannya adalah Bone (Pemerintahan La Inca karena La Tenrirawe Bongkange meninggal pada tahun 1584). Serangan ini telah diperkirakan oleh *Tellu Poccoe* sehingga

dengan cepat datang bantuan dari Wajo dan Soppeng. Dalam peperangan ini, pasukan gabungan *Tellu Poccoe* sukses di setiap front pertempuran. Karena pasukan Gowa telah kelelahan dalam menempuh perjalanan serta mengalami kekalahan, akhirnya terpaksa mundur dan kembali ke Gowa. Serangan Gowa ini ternyata belum juga mampu mengalahkan pasukan gabungan *Tellu Poccoe*.

Serangan Gowa pada tahun 1590 adalah ditujukan ke Wajo. Raja Gowa bersama pasukannya menempuh perjalanan melalui Pare-Pare dengan maksud langsung melakukan penyerangan ke Wajo melalui daerah *Limae Ajatappareng* (Sidenreng, Rappang, Suppa, Sawito, dan Alitta). Akan tetapi rencana ini tidak jadi dilanjutkan, karena ditengah perjalanan Karaeng Bontolangkasa diamuk oleh saudara sesusunya yang bernama I Lolo Tammakkana, oleh sebab itulah ia diberi gelar mati "Keraeng Tunijallo" atau raja yang diamuk (Patunru, 1967: 18).

Ekspansi Politik dan Penyebaran Islam: Gowa Bertahta

Penerimaan Islam di daratan Sulawesi Selatan secara resmi terjadi pada permulaan abad XVII. Islam yang masuk secara resmi itu dibawa oleh tiga orang mubalig dari Minangkabau. Setibanya di Gowa

menyembah dewata supaya diterima. Selain itu, kerajaan-kerajaan bugis teringat pengalaman masa lalu dimana Gowa melakukan penaklukan-penaklukan untuk memperluas wilayah pengaruhnya. Karena perbedaan pandangan itulah sehingga terjadi peperangan antara Tellu Poccoe dengan Gowa.

Sebelum menempuh jalan perang, Gowa menempuh cara damai dengan mengirim utusan agar kerajaan-kerajaan dari Tellu Poccoe bersedia menerima Islam, namun ajakan itu ditolak. Maka jalan yang ditempuh berikutnya adalah memerangi kerajaan yang menolak ajakan itu. Peperangan inilah yang disebut "Musu asellengeng (perang Islam)" (Patunru, 1967: 27) oleh orang Bugis, sedangkan orang Makassar menyebutnya "bundu islamka atau peperangan Islam" (Hamid, 1990: 116).

Pada tahun 1607 atas ajakan Gowa, Suppa dan Sawitto menerima Islam. Kemudian pada tahun 1608 pasukan dikerahkan untuk menyerang Sidenreng, tetapi sebelum mereka berhasil mencapai Sidenreng, Pasukan Tellu Poccoe menghadangnya "di Pekkiya (daerah Sawitto)" (Hamid, 1988/1989: 16) sehingga terjadilah pertempuran di Pakkiya antara pasukan Gowa berhadapan dengan pasukan

Tellu Poccoe. Setelah bertempur selama tiga hari pasukan Gowa mundur dan kembali ke Gowa.

Tiga bulan kemudian pasukan Gowa kembali untuk menyerang, kali ini yang dituju adalah Wajo sebab ketika Gowa menyerang *Limae Ajattappareng* (Sidenreng) Wajo ikut dalam pasukan gabungan Tellu Poccoe membantu Sidenreng menghadang pasukan Gowa. Pasukan Gowa mendarat di daerah Akkotengeng dan Marowanging dalam wilayah Wajo. Suatu kelemahan bagi Wajo karena dua daerah Wajo yaitu Kera, dan Sakkoli berbalik memihak kepada Gowa. Datang pasukan Bone dan Soppeng memberikan bantuan kepada Wajo. Pertempuran pun tak dapat dielakkan lagi, pasukan Gowa berhadapan dengan pasukan Tellu Poccoe. Pasukan Gowa kembali mengalami kekalahan dari pasukan gabungan Tellu Poccoe, pasukan Gowa pun mundur kembali ke Gowa.

Kekalahan Gowa dua kali berturut-turut itu tidak membuatnya menyerah, pada tahun 1609 mengirim kembali pasukan. Penyerangan Gowa kali ini dimulai dari perairan Pare-Pare. Pasukan Gowa menduduki Pandang-Pandang yaitu suatu tempat dekat Gunung Sitoppo. Pertempuran pun kembali berkecamuk, pasukan gabungan Tellu Poccoe bekerjasama dengan *Limae Ajattappareng* (mungkin

Sidenreng, Rappang, dan Alitta sebab Suppa dan Sawitto telah menerima Islam). Setelah memenangkan dua pertempuran sebelumnya, pada pertempuran ini pasukan gabungan Tellu Poccoe dan *Limae Ajattappareng* mengalami kekalahan. Kekalahan pada pertempuran inilah adalah awal perpecahan (bukan bubar) dari persekutuan Tellu Pocoe. "Begitu besar arti kemenangan Gowa ini, sehingga kekalahan yang diderita pihak lawannya, tidak lagi memberikan kemungkinan "Kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo dapat bersatu dalam waktu singkat, atau dengan kata lain bahwa kekalahan mereka itu mengakibatkan rusaknya dan putusnya kembali tali persaudaraan "Persekutuan Tellu Poccoe" itu (Patunru, 1989: 104).

Tellu Poccoe telah mengalami perpecahan pada tahun 1609 yang disebabkan oleh kekalahannya dari Gowa. Dengan kekalahan pasukan gabungan Tellu Poccoe bersama pasukan *Limae Aja Tappareng* maka dalam tahun 1609 itu juga Sidenreng menerima Islam. Sidenreng menerima Islam pada tahun 1609, sehingga pasukan Gowa meneruskan misinya ke kerajaan lain. Setelah Sidenreng, sasaran Gowa berikutnya adalah Soppeng. Gowa menyerang Soppeng dalam tahun 1609 itu juga. Namun, Bone dan Wajo sebagai sesama anggota Tellu Poccoe tidak

memberikan bantuan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah internal ditubuh Tellu Poccoe. "Kebetulan pada waktu itu terjadi kemelut diantara anggota Tellu Poccoe yang berakibat Bone dan Wajo tidak bersedia membantu Soppeng" Rahmah (1991: 31). Hal ini berhubungan dengan kekalahan Tellu Poccoe di Pandang-Pandang pada tahun 1609 sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan konsolidasi dalam tahun 1609 itu juga.

Pertempuran antara pasukan Gowa berhadapan dengan pasukan Soppeng terjadi di daerah Tanete, pertempuran berlangsung sekitar satu bulan. Soppeng harus menerima kenyataan, pasukan Gowa yang dibantu Sidenreng terlalu kuat untuk Soppeng sendiri. Dengan kekalahannya ini, Soppeng pun menerima Islam dalam tahun 1609 dibawah pemerintahan Datu Soppeng XIV (1601-1620).

Selanjutnya Gowa melanjutkan serangannya ke Wajo pada tahun 1610. Bone dan Soppeng juga tidak membantu Kerajaan Wajo. Justeru sebaliknya yang dilakukan oleh Soppeng adalah membantu Gowa bersama Sidenreng/*Limae Aja Tappareng* menyerang Wajo. Akhirnya pihak Wajo meminta gencatan senjata, usul itu diterima oleh Gowa. Maka dalam tahun 1610, Wajo menerima Islam di bawah

pemerintahan Arung Matowa Wajo XII La Sangkuru Patau Mulajaji (1607-1610) yang diberi gelar Islam "Sultan Abdulrahman". Wajo menerima Islam setelah diadakan perjanjian di Topacce do. Perjanjian ini antara lain berisi persahabatan Gowa dengan Wajo.

Islamnya Wajo pada tahun 1610 berarti tinggal Bone dari tiga anggota Tellu Poccoe yang belum menerima Islam. Oleh karena itu tanpa menunggu terlalu lama, Gowa menyampaikan kepada pihak Bone agar bersedia menerima Islam. Raja Bone XI La Tenriruwa bersedia menerima ajakan itu, tetapi ditolak oleh rakyat Bone sehingga ia dipecat jadi raja. Penggantinya diangkatlah La Tenripale To Akkepeang, dialah yang kemudian memimpin peperangan melawan Gowa. Tetapi karena Gowa dibantu oleh *Limae Aja Tappareng*, Soppeng dan Wajo, sehingga Bone tidak dapat berbuat banyak dan akhirnya kalah dalam tahun 1611. Dengan kekalahannya itu pula, maka Bone menerima Islam pada tahun 1611.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid. Pananrangi. 1988/1989. *Lontarak Tellu Poccoe*, Ujung Pandang: Dekdikbud Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

-----, 1990. *Sejarah Daerah Gowa*, Ujung Pandang: Balai Kajian dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan/Tenggara.

Kamaruddin dkk. 1985/1986. *Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallok* (Naskah Makassar), Ujung Pandang: Depdikbud Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: Gramedia.

Mattulada. 1991. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, Ujung Pandang: UNHAS Press.

Patunru, Abdurrazak Daeng. 1964. *Sejarah Wajo*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan/Tenggara.

-----, 1976. *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan/Tenggara.

-----, 1989. *Sejarah Bone*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan/Tenggara.

Ramalang. 1992. *Persekutuan Tellu Poccoe; Suatu Studi Perkembangan Politik di Sulawesi Selatan pada Abad XVI*, Ujung Pandang: UNHAS.

Rahmah. 1991. *Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad XIV-XIX*,

Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan/Tenggara.

Rasyid, MS Darwas. 1994/1995. *La Tenritatta Arung Palakka dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Sulistiyo, Bambang. 1992. *Konflik antar Kerajaan dan Dampaknya di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: MSI Sulawesi Selatan

Sessu, Amir. 1990. *Relung-Relung Sejarah Tanah Bone*, Watampone.

Wolhoff dan Abdurrahim. 1962. *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan

Yani, Muhammad. 1995. *Kerajaan Wajo dalam Persekutuan Tellu Poccoe*, Ujung Pandang: FPIPS IKIP Ujung Pandang.

KUASA BELANDA DI NUSA SELAYAR

Ahmadin

Selayar yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pasca perjanjian Bongaya pun harus kembali harus menerima kenyataan bahwa ia akan diperintah oleh satu kekuatan politik baru yakni Belanda dengan sejumlah kebijakan politik-ekonomi yang "mengerikan". Mengawali kekuasaannya di Selayar, kaum penjajah asal daratan Eropa ini membentuk pemerintahan tingkat keresidenan bernama *Residentie Salaier*. Keresidenan ini kedudukannya di bawah kekuasaan langsung kompeni Belanda, yakni Residen W. Coutrier (1737-1743). Berdasarkan catatan yang tercantum dalam daftar nama-nama kepala daerah/pemerintah di daerah Selayar, menunjukkan bahwa rentang waktu antara 1739 hingga 1820, pemerintah Selayar dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Setelah itu, antara 1839-1857 pimpinan pemerintahan adalah Gezaghebber (Potor) dan sesudah 1857 barulah